

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Menurut PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang AKUNTASI PERKOPERASIAN koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan pilar penyangga perekonomian nasional.

Sesuai dengan Undang Undang no. 25 tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

2.2.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Sesuai dengan Undang Undang no. 25 tahun 1992 tentang koperasi bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pilar penyangga.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

2.2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya tidak hanya pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaannya dan usaha yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi mengatur hubungan anggota dengan koperasi sebagai korporasi, hubungan antara sesama anggota koperasi dan prinsip koperasi yang berlandaskan kekeluargaan

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang Undang No.25 tahun 1992 tentang koperasi bahwa prinsip-prinsip Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Untuk menjadi anggota koperasi dilakukan secara suka rela sehingga anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh orang lain.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Untuk mengembangkan koperasi maka setiap pengambilan keputusan penting anggota harus dilibatkan, pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis lewat rapat anggota tahunan.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Keuntungan yang dibagikan ke anggota koperasi dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Koperasi dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) didasarkan pada besarnya modal yang disetor ke koperasi, kontribusi dan jasa para anggota koperasi.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Setoran modal pada koperasi yang rendah memungkinkan pemberian balas jasa juga rendah, sehingga koperasi mendorong rasa kesetiakawanan untuk mengerti kondisi koperasi serta koperasi mendorong semangat untuk memajukan dan mengembangkan koperasi.

5. Kemandirian

Karena koperasi merupakan badan usaha yang membantu perkembangan perekonomian nasional maka untuk mencapai kemandirian harus memperjuangkan kepentingan anggota dan meningkatkan peran koperasi di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian.

2.1.4 Jenis Jenis Koperasi

Sesuai Peraturan menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 jenis jenis koperai adalah:

1. Koperasi Kelompok Simpan Pinjam

Koperasi Kelompok Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam yang menjadi usaha koperasi. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya jika memerlukan bantuan dana, koperasi ini sangat menguntungkan untuk anggota koperasi, karena anggota diberi kemudahan dalam meminjam bantuan dana. Koperasi ini juga menyediakan pinjaman untuk masyarakat dengan jaminan yang disepakati dengan pengurus koperasi.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi Kelompok Konsumen adalah koperasi yang anggotanya sebagian besar konsumen atau koperasi yang memiliki usaha inti mendistribusikan dan melayani kebutuhan pokok anggota. Koperasi konsumen melayani pembelian dan melakukan pembelian produk yang dipasarkan. Jenis barang yang akan dilayani koperasi konsumen tergantung dengan modal yang dimiliki oleh koperasi serta kebutuhan anggota yang akan dipenuhi.

Seperti contoh : koperasi yang mengelola swalayan, toko, mini market, dll. Koperasi konsumen menyediakan barang yang diperlukan masyarakat maupun anggota koperasi. Harga disesuaikan dengan

harga pasar, keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk penambahan modal koperasi.

3. Koperasi produsen

Koperasi Kelompok Produsen adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghasilkan produksi barang tertentu atau koperasi yang memiliki usaha inti memasarkan hasil produk anggota. Kegiatan koperasi produsen menyediakan, mengoperasikan, mengelola produk yang dihasilkan serta memasarkan produk yang dihasilkan. Koperasi produsen menguntungkan karena koperasi menyatukan kemampuan dan modal yang dimiliki oleh anggota koperasi guna menghasilkan produk yang akan dihasilkan melalui badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

4. Koperasi Aneka Usaha

Koperasi Kelompok Aneka Usaha adalah koperasi yang memiliki usaha pelayanan jasa atau koperasi yang memiliki berbagai jenis kegiatan usaha.

5. Koperasi Wanita

Koperasi Wanita, adalah koperasi yang memiliki anggota sebagian besar atau seluruhnya kaum wanita.

6. Koperasi Pondok Pesantren

Koperasi Pondok Pesantren, adalah koperasi yang berdomisili dilingkungan pondok pesantren dan memiliki anggota sebagian besar atau seluruhnya para santri.

7. Koperasi Pedagang Pasar

Koperasi Pedagang Pasar, adalah koperasi yang tumbuh dilingkungan pasar dan memiliki anggota sebagian besar atau seluruhnya para pedagang pasar.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Deskripsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar posisi keuangan atau neraca dan daftar pendapatan dan biaya atau laporan laba rugi (Munawir, 2004).

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2004:17). Sedangkan definisi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya Standart Akuntansi Keuangan 13 1994 dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Sedangkan menurut Riyanto (1995), laporan keuangan adalah ikhtisar mengenai keadaan financial suatu perusahaan dimana neraca (*balance sheet*) mencerminkan nilai aktiva, hutang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba rugi (*income statement*) yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi satu tahun.

Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat oleh manajemen merupakan alat untuk mempertanggung jawabkan kepada pemilik perusahaan atas

kepercayaan yang telah diberikan (Munawir, 1995:2). Pertanggung jawaban pimpinan perusahaan itu dituangkan dalam bentuk laporan keuangan hanyalah pada sampai penyajian secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu periode sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan yang biasanya meliputi : neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal.

2.2.2 Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*Progress Report*) secara periodik yang dilakukan pihak management yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu *progress report* laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara (Nainggolan, 2004) :

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*)

Laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu *progress report* laporan keuangan terdiri dari data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara fakta yang telah dicatat (*Recorded Fact*), seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam koperasi maupun yang disimpan di Bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki koperasi.

Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam angka-angka pada saat terjadinya peristiwa tersebut (*at original cost*).

Dengan demikian maka laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan dari suatu koperasi dalam kondisi perekonomian yang paling akhir, karena segala sesuatunya sifatnya historis. Sehingga kemungkinan terdapat beberapa hal yang dapat membawa akibat terhadap posisi keuangan koperasi tidak dicatat dalam pencatatan akuntansi atau tidak nampak dalam laporan keuangan, misalnya adanya pesanan yang tidak dapat dipenuhi, berbagai kontrak pembelian atau penjualan yang telah disetujui dan adanya hak-hak patent yang masih dalam pengurusan, karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dikuantifikasi.

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi
(*accounting convention and postulate*)

Data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*General Accepted Accounting Principles*), hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman.

3. Pendapat pribadi (*personal judgment*)

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi

standard praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung dari akuntan atau management koperasi yang bersangkutan. *Judgment* atau pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan di dalam beberapa hal (Nainggolan, 2004).

2.2.3 Keterbatasan Laporan Keuangan

Dengan mengingat atau memperhatikan sifat laporan keuangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan (Laboratorium Pengembangan Akuntansi Universitas Guna Darma) antara lain:

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan *intern report* (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final, karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuiditas atau realisasi dimana dalam *intern report* ini terdapat pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan.
2. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan unit yang dijual semakin besar. Mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin diikuti kenaikan.

3. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat berdasarkan konsep *Going concern* atau anggapan bahwa perusahaan akan berjalan historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresinya. Karena itu angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya.

2.2.4 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan (Prastowo dan Juliaty, 2002):

1. Neraca

Merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) pada saat tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja)

selama periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai penyebab bertambah atau berkurangnya modal suatu entitas dalam satu periode.

4. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar suatu entitas dalam suatu periode.

5. Catatan atas laporan keuangan

Merupakan catatan yang ditambahkan pada bagian akhir laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi lebih rinci kepada pembaca dan pengguna laporan keuangan.

2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia bahwa karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi. Terdapat karakteristik pokok Laporan Keuangan, yaitu :

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna.

2. Relevan

Agar dapat bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi

kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dan dapat membantu mereka mengetahui peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna dimasa lalu.

3. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

4. Keandalan

Agar bermanfaat informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faith representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

6. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidak

pastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Kelengkapan agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*)

mempengaruhi keputusan yang diambil.

9. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.2.6 Laporan Keuangan Koperasi

Dalam Undang Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

2. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Perhitungan Hasil Usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Perhitungan Hasil Usaha

menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan Hasil Usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.

- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

- a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
 - i. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.

ii. Kebijakan akuntansi tentang asset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.

b. Pengungkapan informasi lain antara lain:

i. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktik atau yang telah dicapai oleh koperasi.

ii. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.

iii. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.

iv. Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.

v. Pembatasan penggunaan dan risiko atas asset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.

vi. Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.

vii. Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta. Pembagian sisa hasil usaha

dan penggunaan cadangan.

- viii. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

2.2.7 Perlakuan Akuntansi Koperasi

Koperasi harus dikelola secara profesional. Seperti pada Badan Usaha lain, peranan akuntansi sangat penting untuk mengelola keuangan koperasi. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.

(Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia).

Berikut ini disajikan perlakuan akuntansi koperasi:

1. Akuntansi Aset

Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh

koperasi. Aset yang diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset tetap. Adapun komponen Aset adalah sebagai berikut:

a. Aset lancar

Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun Aset lancar meliputi komponen perkiraan:

- 1) Kas.
- 2) Bank.
- 3) Surat Berharga.
- 4) Piutang Usaha.
- 5) Piutang Pinjaman Anggota.
- 6) Piutang Pinjaman Non-anggota.
- 7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
- 8) Persediaan.
- 9) Biaya dibayar dimuka.
- 10) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.
- 11) Aset Lancar Lain.

b. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi (penyusutan). Aset tidak lancar meliputi komponen perkiraan:

- 1) Investasi Jangka Panjang.
- 2) Properti Investasi.
- 3) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.
- 4) Aset Tetap.
- 5) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.
- 6) Aset Tidak Berwujud.
- 7) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
- 8) Aset Tidak Lancar Lain.

2. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh koperasi di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.

Kewajiban merupakan tanggung jawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi.

Adapun Komponen Kewajiban adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan memelihara likuiditas koperasi, dan harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi koperasi. Kewajiban jangka pendek meliputi perkiraan antara lain :

- 1) Simpanan Anggota.

- 2) SHU Bagian Anggota.
- 3) Utang Usaha.
- 4) Utang Bank/Lembaga Keuangan Lain.
- 5) Utang Jangka Pendek lainnya.
- 6) Beban yang masih harus dibayar.
- 7) Pendapatan diterima dimuka.

b. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan investasi dan atau kebutuhan lainnya, dan dapat dilunasi lebih dari satu tahun. Kewajiban jangka panjang meliputi perkiraan antara lain:

- 1) Utang Bank/Lembaga Keuangan Lain.
- 2) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja.
- 3) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah modal yang mempunyai ciri : Berasal dari anggota, menanggung resiko dan berpendapatan tidak tetap. Tidak dapat dipindah tangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya, atau jika koperasi bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan.

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang berciri seperti simpanan pokok atau simpanan wajib; modal sumbangan/hibah;

cadangan dan sisa hasil usaha (SHU) tahun berjalan. Adapun

Komponen Ekuitas adalah sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok.
- b. Simpanan Wajib.
- c. Hibah/Modal Sumbangan.
- d. Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan.
- e. Cadangan.

4. Perhitungan Hasil usaha

Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi.

Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU bukan semata-mata mengukur besaran laba tetapi juga menggambarkan manfaat lain bagi anggota.

Adapun Komponen Perhitungan Hasil Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Anggota.
- b. Pendapatan dari Non-anggota.
- c. Sisa Hasil Usaha Kotor.
- d. Beban Operasional.
- e. Pendapatan dan atau Beban Lainnya.
- f. Beban Pajak.
- g. Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak.

5. Laporan arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar uang tunai atau setara tunai. Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah, terdiri dari : aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Adapun Komponen Arus Kas adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas Operasi.
- b. Aktivitas Investasi.
- c. Aktivitas Pendanaan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.

Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas meliputi:

- a. Laba/rugi untuk periode.
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.
- c. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas.

d. Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas, yang menunjukkan perubahan secara terpisah dari:

- 1) Laba/rugi.
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.
- 3) Jumlah SHU yang dibagikan dan distribusi lain untuk anggota, yang menunjukkan secara terpisah komponen simpanan anggota.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus diungkapkan atau diinformasikan antara lain :

- a. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya, diantaranya memuat:
 - 1) Pengakuan, perlakuan dan kebijakan akuntansi mengenai aset tetap.
 - 2) Kebijakan akuntansi tentang persediaan.
 - 3) Kebijakan akuntansi mengenai piutang.
- b. Pos-pos yang nilainya material (berdasarkan ketentuan pada masing-masing koperasi), harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata, memuat informasi lain seperti :

- 1) Kegiatan pelayanan utama koperasi kepada anggota.
- 2) Informasi mengenai kegiatan bisnis koperasi dengan non-anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan.
- 3) Aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi dan pengembangan kemampuan sumberdaya anggota melalui pendidikan dan pelatihan.

2.3 Analisis Rasio Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan, yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih akurat.

Menurut Myer (2004:5) definisi analisa laporan keuangan adalah “Analisa laporan keuangan adalah analisa mengenai dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan”.

Menurut Dwi Prastowo (2008:56) definisi analisis laporan keuangan adalah: “Analisa laporan keuangan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai-bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisa laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah proses penganalisaan atau penyidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi beserta lampiran-lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat “kesehatan” perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.

2.3.2 Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang cukup penting untuk mengambil keputusan yang bersifat ekonomi. Analisa laporan keuangan mencakup pengaplikasikan berbagai alat dan teknik analisa pada laporan keuangan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan (<https://ekadianaristy.blogspot.co.id/2016/03/analisis-laporan-keuangan>).

Menurut Kasmir (2008) analisa laporan keuangan dilakukan untuk mencapai tujuan:

1. Untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu baik aktiva, kewajiban dan harta maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan.

3. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini.
4. Untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen kedepan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau tidak.

2.3.3 Rasio Laporan Keuangan

Pada dasarnya angka-angka rasio ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Berdasarkan sumber data yang digunakan (Munawir, 2002:68).
Rasio tersebut dibedakan menjadi:
 - a. Rasio-rasio neraca, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca. Misalnya *current ratio*, *quick ratio* dan *cash ratio*,
 - b. Rasio-rasio laporan laba rugi, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari laporan rugi laba,
 - c. Rasio-rasio antar laporan keuangan, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan laporan laba rugi.
2. Berdasarkan tujuan analisis (Munawir, 2002:68).
Yaitu untuk mengevaluasi keadaan ekonomi suatu perusahaan, analisis rasio-rasio tersebut dibedakan menjadi:
 - a. Analisis Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat

menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Mengukur kemampuan dengan melihat aktiva lancar perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancar. Suatu perusahaan mempunyai keuangan jangka pendek yang kuat apabila mampu memenuhi tagihan dari kreditur jangka pendek tepat pada waktunya, mampu memelihara modal kerja yang cukup untuk membelanjai operasi perusahaan yang normal, mampu membayar bunga utang jangka pendek dan deviden, dan mampu memelihara kredit ranting yang menguntungkan.

Untuk menilai likuiditas perusahaan menggunakan rasio :

i. *Current Ratio*

Current Ratio adalah perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar.

Secara matematis dapat dirumuskan:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Current Ratio ini menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Jika perusahaan tingkat persentase rasio tinggi belum tentu dapat menjamin akan dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo. Hal ini dikarenakan adanya jumlah persediaan yang relative tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan

rendah. Semakin kecil hutang lancar maka semakin besar persentase *current ratio*. *Current Ratio* 200% hanya merupakan kebiasaan dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisis lebih lanjut.

b. Analisis Rasio Solvabilitas

Analisis rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila Perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dikatakan *solvable* apabila perusahaan mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya.

i. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu utang.

Keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan diukur dengan cara matematis sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Dalam mengartikan rumus diatas dapat menggunakan asumsi sebagai berikut, dimisalkan apabila suatu perusahaan menetapkan bahwa total *Debt to Equity Ratio*

yang harus dipertahankan adalah 1:2 atau 200%, ini berarti bahwa setiap total utang sebesar Rp 1,00 harus dijamin dengan modal sendiri Rp 2,00.

c. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini disebut juga *rasio rentabilitas*. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2008:304).

i. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), *Net Profit Margin* adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini sangat penting bagi manajer operasi karena

mencerminkan strategi penetapan harga penjualan yang diterapkan perusahaan dan kemampuannya untuk mengendalikan beban usaha. Menurut Weston dan Copeland (1998), semakin besar *Net Profit Margin* berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya.

Net profit margin dihitung dengan rumus:

$$NPM = \frac{\text{Perhitungan Hasil Usaha}}{\text{Penjualan/Pendapatan}} \times 100 \%$$

Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara laba bersih dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu risiko. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui

hal tersebut investor dapat menilai apakah perusahaan itu *profitable* atau tidak.

2.4 Kinerja

2.4.1 Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Menurut Sukardi (2005:242) mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian suatu organisasi. Kinerja keuangan berarti suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja pada bidang koperasi.

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003:223), “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Mink (1993:76) mengemukakan pendapatnya, bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya:

1. Berorientasi pada prestasi.
2. Memiliki percaya diri.
3. Berperngendalian diri.
4. Kompetensi.

2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000:31) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar

beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.4.3 Manfaat Penilaian Kinerja

Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengukur prestasi yang dicapai suatu organisasi dalam suatu periode waktu tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian prestasi atau tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang dalam mencapai tujuan perusahaan.
4. Dipakai sebagai petunjuk oleh manajemen dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Digunakan sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan (Ulin Ni'mah, 2011).

2.4.4 Penilaian Kinerja Koperasi

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.

Kinerja menjadi ukuran prestasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, istilah kinerja perusahaan kerap kali disamakan dengan kondisi keuangan perusahaan yang dengan pengukuran-pengukuran keuangan mampu memberikan hasil yang memuaskan setidak-tidaknya bagi pemilik saham perusahaan itu maupun bagi karyawannya. (Munawir, 2002:73).

Proses pengukuran kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu tahap persiapan dan tahap penilaian (Mulyadi, 2001: 418),

1. Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci, yaitu :
 - a. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab, Perbaikan kinerja harus diawali dengan penetapan garis batas tanggung jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya. Batas tanggung jawab yang jelas ini dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau standar yang harus dicapai oleh manajer yang akan diukur kinerjanya. Tiga hal yang berkaitan dengan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab, yaitu kriteria penetapan tanggung jawab, tipe pusat pertanggungjawaban, karakteristik pusat pertanggungjawaban.
 - b. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja Penetapan kriteria kinerja manajer perlu dipertimbangkan beberapa faktor antara lain :
 - 1) Dapat diukur atau tidaknya kriteria,
 - 2) Rentang waktu sumber daya dan biaya,

- 3) Bobot yang diperhitungkan atas kriteria,
 - 4) Tipe kriteria yang digunakan dan aspek yang ditimbulkan.
- c. Pengukuran kinerja sesungguhnya Langkah berikutnya dalam pengukuran kinerja adalah melakukan kinerja bagian atas aktivitas sesungguhnya, yang menjadi daerah wewenang manajer tersebut. Pengukuran kinerja tampak obyektif dan merupakan kegiatan yang rutin, namun seringkali memicu timbulnya perilaku yang tidak semestinya ataupun menyimpang yaitu perataan (*smoothing*), pencondongan (*biasing*), permainan (*gaming*), penonjolan dan pelanggaran aturan (*focusing and illegal act*).
2. Tahap Penilaian terdiri dari tiga tahap rinci (Mulyadi,2001:424)
- a. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, penilaian kinerja tersebut dijelaskan, hasil pengukuran kinerja secara periodik kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar, Penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan perlu dianalisis untuk menentukan penyebab terjadinya penyimpangan, sehingga dapat direncanakan tindakan untuk mengatasinya.
 - c. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan Tahap terakhir dalam pengukuran kinerja adalah tindakan koreksi untuk menegakkan

perilaku yang diinginkan dan mencegah terulangnya tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan. Penilaian kinerja ditujukan untuk menegakkan perilaku tertentu dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk memperbaiki kinerja pengurus koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit.

1. Penegakan disiplin harus dilaksanakan secara maksimal. Hal ini salah satunya ditandai dengan kejelasan akan sanksi dan punishment atas kesalahan yang diperbuat oleh oknum pengurus koperasi. Hendaknya disadari bahwa pengurus koperasi, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaiannya, dan apabila dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dijadikan wahana evaluasi hasil kinerja tahunan para pengurus koperasi sebagai wujud akuntabilitas. Meskipun Koperasi berazas kekeluargaan, pertanggungjawaban para pengurus tidak bisa ditempuh secara “kekeluargaan” dengan memberikan toleransi yang tinggi atas penyimpangan yang dilakukan pengurus. Mekanisme reward and punishment terhadap pengurus harus diperbaiki dengan berlandaskan pada anggaran dasar dan kriteria kinerja yang jelas.
2. Birokrasi yang berbelit-belit seharusnya dipangkas. Prosedur dan tata cara perizinan, pelaporan maupun pertanggungjawaban, baik secara teknis

maupun administratif yang terlalu panjang sering justru mematikan kreatifitas usaha sehingga menurunkan kinerja.

3. Menumbuhkan budaya berdasarkan Misi. Mengubah koperasi yang digerakkan oleh peraturan dan birokrasi menjadi koperasi yang digerakkan oleh misi. Cita-cita mulia dari pendirian sebuah koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, harus diterjemahkan secara kongkrit dalam bentuk budaya organisasi.
4. Koperasi berorientasi pada anggota dan masyarakat. Pertanggungjawaban pengurus pada saat RAT mestinya bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan birokrasi tetapi penilaian terhadap seberapa berhasil para pengurus memenuhi kebutuhan dan harapan anggota atau masyarakat selain anggota koperasi. Pada umumnya pengurus koperasi salah dalam mengidentifikasi variabel apa saja yang harus dipertanggungjawabkan pada saat RAT. Orientasi pengurus adalah bagaimana agar laporan pertanggungjawabannya dapat diterima oleh sebagian besar anggota koperasi meskipun dalam jangka panjang kemungkinan bisa mengurangi daya saing eksternal.
5. Berorientasi pada mekanisme pasar. Koperasi harus mengembangkan prinsip-prinsip perusahaan dan pasar secara maksimal. Penerimaan pegawai harus mengikuti seleksi ketat sesuai kemampuannya masing-masing sehingga bisa direkrut karyawan yang benar-benar kompeten dan trampil

secara profesional. Mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan) yang umumnya masih kental diterapkan pada lingkungan koperasi harus segera diganti dengan mekanisme pasar (sistem insentif) yang cukup fleksibel mengikuti dinamika pasar.

6. Penerapan teknologi maju. *Computerized system* terbukti mampu meningkatkan kinerja operasional suatu usaha sehingga koperasi tidak bisa menghindar dari kondisi dinamis seperti ini. Pelatihan dan pemberdayaan pengurus serta pegawai harus dilakukan secara terus menerus agar mereka tidak gagap teknologi. Kompetisi harus menjadi sarana untuk memicu inovasi para pengurus untuk eksis dan selalu berkembang

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, hal yang akan diteliti adalah mengenai posisi kinerja keuangan Koperasi. Untuk mengetahui posisi kinerja keuangan perusahaan maka perlu menganalisa laporan keuangannya.

Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Diantaranya adalah dengan menggunakan analisis rasio.

Rasio keuangan adalah rasio untuk mengetahui posisi keuangan dengan menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan koperasi berupa neraca dan laporan laba rugi sehingga rasio-rasio keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan koperasi dapat diketahui.

Kinerja keuangan koperasi mencerminkan kemampuan pengelolaan keuangan koperasi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Untuk mengetahui kinerja suatu koperasi maka perlu menganalisis laporan keuangan. Hal ini perlu

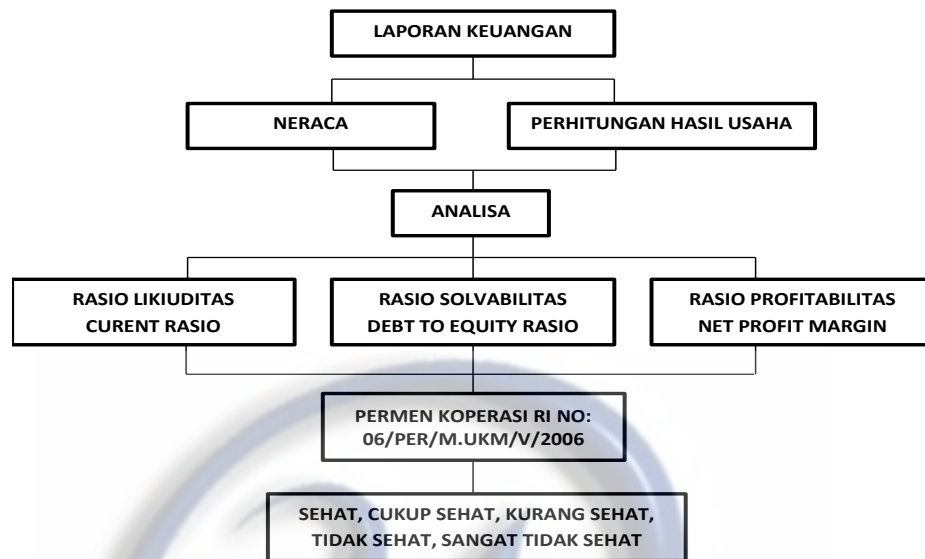
dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan koperasi dalam mengelola koperasi tersebut sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan koperasi dan diketahui bidang-bidang yang harus mendapat perhatian lebih banyak serta mampu membuat kebijakan yang lebih baik dan mengarahkan tindakannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup koperasi.

Analisis keuangan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas suatu koperasi.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio likuiditas dapat dihitung dengan *Current Ratio*. Analisis Rasio Solvabilitas dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh dan proses menganalisis rasio-rasio yang berhubungan dengan pelunasan kewajiban jangka panjang perusahaan serta pengembalian Modal. Pengukuran rasio solvabilitas dihitung dengan cara *Debt to Equity Ratio*. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Pengukuran rasio Profitabilitas dihitung dengan cara *Net Profit Margin*.

Acuan yang digunakan sebagai dasar menilai tingkat kesehatan kinerja keuangan koperasi adalah berdasarkan rentang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.UKM/V/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi/koperasi award dimana tingkat kesehatan yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, Tidak Sehat dan Sangat Tidak Sehat.

Bagan kerangka berfikirnya adalah seperti bagan berikut ini.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Berfikir